

Tanggal berlaku: 1 October 2022

Kebijakan Kelapa Sawit Keberlanjutan – Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi

Lingkup Kebijakan:

Kebijakan Minyak Kelapa Sawit Keberlanjutan berlaku untuk:

- Semua unit operasi POSCO INTERNATIONAL yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit, termasuk anak perusahaan, usaha patungan, dan perusahaan yang dikendalikan manajemen.
- Semua pemasok pihak ketiga di tingkat grup. Grup pemasok adalah grup perusahaan terkait minyak sawit yang memasok tandan buah segar (TBS), minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kelapa sawit olahan

Penerapan

Prosedur pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua aspek kebijakan ini. Bagi pemasok pihak ketiga, kami akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan bahwa pemasok menerapkan kebijakan ini dan berkomitmen terkait melalui proses dengan waktu yang telah ditentukan

POSCO INTERNATIONAL, melalui anak perusahaannya PT. BIA, berhak untuk menanggukkan semua pembelian dan perjanjian lainnya dengan pemasok minyak level grup mana pun yang terbukti melanggar atas kebijakan ini.

1. Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan

- Mematuhi hukum dan peraturan nasional, dan standard internasional yang terkait dengan perlindungan lingkungan;¹
- Hanya memanfaatkan lahan yang telah dikategorikan untuk pengembangan kelapa sawit oleh Pemerintah Indonesia;
- Melarang semua teknik pembakaran yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan perkebunan;
- Tidak ada pengembangan perkebunan baru di lahan gambut berapapun kedalamannya; Menerapkan praktik-praktik Manajemen Terbaik untuk setiap perkebunan yang ada yang berlokasi di lahan gambut;²
- Tidak ada pengembangan perkebunan baru untuk pada area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), yang diidentifikasi melalui penilaian NKT yang telah ditinjau ulang dan penilaian SKT (atau NKT-SKT terintegrasi yang ditinjau secara berkualitas);³

¹ International standards refer to the United Nations Declaration on the Human Environment, Rio Declaration on Environment and the United Nations Framework Convention on Climate Change

² Best Management practices as defined by the RSPO and peat experts

³ At the time of publishing this policy, POSCO INTERNATIONAL has no plans for any new plantation development in Papua, Indonesia. In accordance with RSPO indicator 7.12.2 and Annex 5 for the RSPO P&C (2018), POSCO INTERNATIONAL's existing uncertified plantations

- Melindungi kawasan NKT & SKT melalui rencana manajemen terpadu;
- Mempromosikan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam perkebunan kami dan area konservasi di luar lokasi;
- Melarang penangkapan ilegal, perburuan liar, berburu dan perdagangan hewan, terutama spesies yang terancam punah, langka, dan terancam (ERT). Namun, kami menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat untuk berburu secara hukum dan berkelanjutan tanpa melibatkan spesies ERT dan membahayakan kelayakan jangka panjang spesies;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana restorasi dan/atau konservasi untuk deforestasi atau pengembangan lahan gambut yang tidak sesuai dengan kebijakan ini;⁴
- Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), polusi yang signifikan dan limbah yang terkait dengan pengelolaan minyak sawit.⁵

2. Perlindungan, dan Penghormatan terhadap, Hak Asasi Manusia

- Menghormati hak-hal pekerja dan masyarakat yang terkait dengan operasional perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standard internasional;⁶
- Menyediakan pekerjaan yang adil dan setara untuk semua karyawan tanpa memandang ras, kebangsaan, penganut agama atau gender;
- Memastikan proses rekrutmen yang etis termasuk bahwa pekerja tidak dikenakan biaya apa pun yang berkaitan langsung dengan rekrutmen penempatan kerja sementara atau permanen, dan tidak ada penahanan dokumen identitas;
- Mencegah praktek kerja paksa, berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang adil termasuk pembayaran upah yang memenuhi atau melampaui persyaratan hukum, dengan mempertimbangkan target produksi dan jam kerja yang wajar, dan menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama;
- Melindungi dan menghormati hak-hak pekerja migran;
- Melindungi anak-anak dari eksploitasi termasuk tindakan-tindakan yang mencegah adanya 'Bentuk Pekerjaan yang tidak Aman untuk Anak' didefinisikan oleh Konvensi ILO 182;⁷ dan pekerja di bawah usia 18 tahun, kecuali dalam situasi di mana ia merupakan magang kejuruan dan/atau terstruktur formal, pendidikan atau program pelatihan;
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman yang berfokus pada pencegahan kecelakaan dan minimalisasi risiko;
- Menghormati dan melindungi hak-hak kelompok masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau melaksanakan Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) pada kegiatan operasional di tanah yang menjadi hak-hak hukum, Hak komunal dan Hak adat;
- Melakukan pemetaan partisipatif sebelum pengembangan baru untuk menetapkan batas-batas komunitas dan keputusan penggunaan lahan;

are required to conduct a new HCV assessment, and any new land clearing by POSCO INTERNATIONAL will be preceded by an HCV-HCSA assessment

⁴ POSCO INTERNATIONAL will develop and implement forest restoration and/or conservation plans for areas outside the current concession area to compensate for deforestation that the group conducted prior to October 2017, the date when all forest clearance was suspended in the group's palm oil operations in Papua, Indonesia

⁵ Using appropriate tools such as the RSPO Palm GHG calculator

⁶ International standards refer to the UN Declaration on the Rights of Indigenous People, Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization's core conventions, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, and the Free and Fair Labor in Palm Oil Production

⁷ https://www.ilo.org/ipcc/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Convention/lang--en/index.htm

- Mengidentifikasi langkah-langkah untuk memberikan remediasi dimana perusahaan telah menyebabkan atau memberikan dampak negatif terhadap hak asasi manusia;
- Mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penerapan perkebunan kelapa sawit plasma.

3. Keterlibatan dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

- Membangun jaringan sumber transparan dengan ketertelusuran dan bekerja sama erat dengan pemasok dan pemangku kepentingan terkait untuk mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan ini;
- Bekerja dengan pemangku kepentingan terkait termasuk organisasi verifikasi independen untuk menerapkan praktik terbaik dan kebijakan ini;
- Membangun mekanisme keluhan oleh pemangku kepentingan yang kredibel dan transparan;
- Membangun dashboard keberlanjutan untuk mengkomunikasikan informasi, kemajuan menuju kepatuhan kebijakan, kemajuan penyelesaian keluhan, dan keterlibatan dan verifikasi pemasok;
- Menerbitkan laporan kemajuan kegiatan yang sedang berlangsung mengenai implementasi komitmen keberlanjutan melalui dashboard keberlanjutan;
- Menyelesaikan masalah dan keluhan yang diajukan terkait pengembangan perkebunan oleh karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait melalui proses yang terbuka dan transparan.

Dengan penerbitan kebijakan ini, kebijakan keberlanjutan minyak kelapa sawit yang sudah ada sebelumnya yang dikeluarkan pada 1 Maret 2020 dicabut dan tidak berlaku.

1 October 2022
Presiden dan CEO
Joo Si-Bo